

# Tim Banggar DPRD Karawang Sidak ke Beberapa Pembangunan Infrastruktur



## KARAWANG - JAVA NEWS

DPRD Kabupaten Karawang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa pembangunan infrastruktur, diantaranya Gedung Pemda 2 lapangan Karangpawitan, GOR panatayudha dan yang terakhir Dinas PUPR, rabu (14/7/2019).

Sidak dipimpin langsung oleh ketua DPRD H Toto Suropto SE, didampingi Wakil Ketua I, Hj Sri Agustina SH, Wakil Ketua Komisi A Indriyani ST, Ketua Komisi B ir H Danu Hamidi, Anggota komisi B Natala Sumed. Anggota komisi C, Nyi Sekar Arum dan Wakil Ketua Komisi D, H Endang Sodikin.

"Khusus untuk Pemda 2, Kami merasa kecewa dengan hasil pembangunan ini, karena bangunan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Padahal bangunan ini dibiayai oleh APBD, dengan anggaran yang cukup fantastis, mencapai puluhan milyar berasal dari uang rakyat dan digunakan untuk pembangunan gedung seperti ini," ucap H Toto Suropto usai sidak pemda 2.

Dikatakan oleh Wakil Ketua Hj Sri Agustina, saat melihat bangunan, Ia khawatir akan jadi temuan BPK, sedangkan sudah WTP, tapi

real dilapangan seperti ini. "Ya harus bisa mempertanggungjawabkan, karena ini uang negara, uang APBD dan uang rakyat. Sekarang di 2019 ini, ada pemeliharaan gedung tapi belum digunakan, sementara sudah ada pemeliharaan. Apalagi sekarang masuk ranah hukum, batas-batasnya kita belum tahu, perencanaannya harus benar-benar matang," tegasnya.

Nyi Sekar Arum dan Indriyani sepakat, jika Pemerintah Karawang tidak menggunakan gedung tersebut, maka DPRD siap menggunakannya. "Sangat disayangkan, gedung bangunan ini tidak selesai tepat waktu, dan sekarang kita lihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada pagar batas pengamanan, jadi yang dikhawatirkan, kalau dibiarkan akan cepat rusak," kata NatalaSumedha selaku anggota Banggar.

"Harapan kami, harus cepat diefektifkan dan dimanfaatkan agar terpelihara, jadi nanti kami akan membantu anggaran pembangunan, bukan pemeliharaan, karena belum digunakan," cetus ir H Danu Hamidi.

H Endang Sodikin menambahkan, kepada pihak yang memenangkan tender, ketika melaksanakan pekerjaan, seharusnya langsung dikuatkan

dengan aturan, dan diberi teguran atau sanksi jika mereka tidak menyelesaikan pekerjaannya. Kalau lihat dari praktik Banggar, harus siap dari awal, sebelum dan sesudah tender harus ada kepastian hukum, karena selama ini banyak pekerjaan yang mangkrak, padahal bugeting memadai. Maka harus kembali ke Komisi III yang berkaitan dengan bidang ini harus bisa melihat, inilah persoalan yang harus dituntaskan.

Menurutnya, Kaitannya dengan LKPJ adalah kinerja selama satu tahun anggaran 2018, dengan adanya temuan-temuan dilapangan, yaitu bangunan yang belum selesai dikerjakan. Ketika di cek ke PUPR, semua terkendala pada anggaran, perencanaan program dan anggaran ini juga tidak sinkron, artinya terlalu banyak perencanaan, tapi tidak memikirkan kaitan anggaran, seharusnya ketika perencanaan, mereka juga harus bisa menaikan PAD.

Wakil Ketua I DPRD saat menutup acara Sidak mengatakan, bahwa sampai hari ini pemerintah daerah belum bisa menaikan PAD secara signifikan dari beberapa sektor, contohnya dari sektor pariwisata, dengan mengandeng PHRI dan membuka obyek-obyek wisata.

Tetapi secara infrastuktur, ungkapnya, yang lainnya juga belum bisa dinikmati ketika banyak perencanaan dan banyak program, itu tinggal bagaimana pemerintah daerah bisa menaikan PAD. "Yang paling real adalah DBHTB, tetapi tidak bisa tercapai juga, karena yang membuat ozon paling besar adalah pabrik, yang kadang datang kadang tidak. Maka dari itu, bagaimana pemda bisa menciptakan iklim untuk para pengusaha, agar tidak merasa terganggu dengan yang lainnya. (ro pendi)